

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN
KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN *RISK MANAGEMENT*
*COMMITTEE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Non Finansial yang
Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

YUDIATI INDAH SETYARINI
NIM. C2C007140

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yudiati Indah Setyarini
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007140
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
KARAKTERISTIK DEWAN
KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN RISK
MANAGEMENT COMMITTEE (Studi
Empiris Pada Perusahaan Non
Finansial yang Terdaftar Di BEI Tahun
2008-2009)**

Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 18 April 2011

Dosen Pembimbing,

Nur Cahyonowati, SE., M.Si., Akt.

NIP. 19810813 200801 2007

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yudiati Indah Setyarini
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007140
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2009)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 4 Mei 2011.

Tim Penguji :

1. Nur Cahyonowati, SE., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt. (.....)
3. Wahyu Meiranto, SE., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya Yudiati Indah Setyarini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Risk Management Committee* (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2009)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 April 2011

Yang membuat pernyataan,

(Yudiati Indah Setyarini)
NIM : C2C00714

ABSTRACT

This research aims to examine the association between board of commissioner characteristics and firm characteristics to the Risk Management Committee (RMC) disclosure). RMC disclosure in question is the existence of RMC in the company, whether affiliated with the audit committee or separate from the audit committee and independent. Characteristics of the board of commissioners used in the study are independent commissioners, board size, and frequency of meetings. While the characteristics of companies that used such a reputation of auditors, financial reporting risks, complexity, and leverage.

Collecting data using a purposive sampling method to non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008 until 2009. A total of 140 non-financial companies used as a sample. Hypothesis testing is done by using logistic regression analysis.

The results of this study indicate that the variables that affect the existence of RMC which affiliated with the audit committee are auditor reputation variables and control variables firm size. While the variables that affect the existence of separate RMC from the audit committee are meeting frequency and control variables firm size.

Keywords: Corporate Governance, Risk Management Committee, Board of Commissioner Characteristics, Firm Characteristics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *Risk Management Committee* (RMC). Pengungkapan RMC yang dimaksud adalah keberadaan RMC di dalam perusahaan, apakah tergabung dengan komite audit atau terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri. Karakteristik dewan komisaris yang digunakan antara lain komisaris independen, ukuran dewan, dan frekuensi rapat. Sedangkan karakteristik perusahaan yang digunakan antara lain reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, kompleksitas, dan *leverage*.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2009. Sebanyak 140 perusahaan non finansial digunakan sebagai sampel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit yaitu variabel reputasi auditor dan variabel kontrol ukuran perusahaan. Sedangkan variabel yang mempengaruhi keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri yaitu variabel frekuensi rapat dan variabel kontrol ukuran perusahaan.

Kata Kunci: *Corporate Governance*, *Risk Management Committee*, Karakteristik Dewan Komisaris, Karakteristik Perusahaan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Risk Management Committee* (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2009)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Mohamad Nasir, MSi, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Nur Cahyonowati, SE, MSi, Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Much. Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Surya Rahardja, SE, MSi, Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Papa Soehoedi dan Mama Mulia Wahyuni yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, serta motivasi kepada penulis. Serta Mas Riko dan Mas Doni (Alm.) kakakku tersayang yang telah menjadi kakak terbaik yang aku punya dan membantuku dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Bapak Eyang dan Ibu Eyang (Alm.) serta Tante Dewi yang selalu menyemangati untuk cepat menyelesaikan kuliah di Semarang. Hidup di Semarang itu keras.
9. Sahabatku LEGI Pika, Meyung, Ririn, Prima, Adis, Tika, Mba Maya, Jeremy yang telah memberikanku pertemanan yang sangat berkesan selama aku di Semarang dan selalu bersedia menerima keluhan kesahku. Love you guys.
10. Sahabatku GA Girls Windy, Mita, Fiza, Mami Dwi, Milly, Nihal, Dian, Nisa serta Mbah Tantri dan Mba Dinda yang telah menjadi teman kos terbaik selama aku di Semarang. Semoga kebersamaan kita akan terus berlanjut sampai tua.
11. Sahabatku Nufigariciyudherid Nia, Swetonk, Ria Gembil, Kiki Bitchy, Riska, Citra Dengler, Daya Wong, Gabby yang telah mengajarku arti sahabat dan selalu menyemangati dan menerimaku apa adanya.

12. Teman kosku di Tembalang Sela. Echi, Ria. Terima kasih telah menjadi teman kosku yang baik. Aku akan inget kejadian apa yang terjadi di kos kita yang membuat kita terheran-heran sampai sekarang.
13. Temen Jalan-jalan, Bang Jek, Om Syur, Hari Siegel, Bebek, Koko Samin, Amel, Hana Gono, Ratih, Arie, Fajrul. Ayo kita hang out lagi. Masa muda masa berapi-api.
14. Teman-teman KKN Palebon yang telah menjadi keluarga selama 1,5 bulan ketika masa KKN. Pale-pale family keep contact ya guys! Proker jalan-jalan harus tetep direalisasikan ya.
15. Teman-teman Akuntansi 2007 sebagai teman seperjuangan selama masa kuliah.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 18 April 2011

(Yudiati Indah Setyarini)
NIM : C2C007140

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Jika ada niat maka akan ada jalan

Belajarliah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya (Albert Einstein)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Papa, Mama serta Kakakku tercinta.

Atas kasih sayang kepadaku yang tak terhingga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	12

2.1.2 <i>Signalling Theory</i>	15
2.1.3 Risiko.....	16
2.1.4 Manajemen Risiko	17
2.1.5 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Indonesia.....	18
2.1.6 Komite Manajemen Risiko (<i>Risk Management Committee</i>)	21
2.1.7 Komisaris Independen.....	23
2.1.8 Ukuran Dewan	24
2.1.9 Frekuensi Rapat	25
2.1.10 Reputasi Auditor	26
2.1.11 Risiko Pelaporan Keuangan.....	27
2.1.12 <i>Leverage</i>	27
2.1.13 Kompleksitas.....	28
2.1.14Ukuran Perusahaan.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran	33
2.4 Hipotesis	35
2.4.1 Proporsi Komisaris Independen dengan Pengungkapan RMC	36
2.4.2 Ukuran Dewan dengan Pengungkapan RMC	37
2.4.3 Frekuensi Rapat dengan Pengungkapan RMC	38
2.4.4 Reputasi Auditor dengan Pengungkapan RMC	39
2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan dengan Pengungkapan	

	RMC	40
	2.4.6 Kompleksitas dengan Pengungkapan RMC	41
	2.4.7 <i>Leverage</i> dengan Pengungkapan RMC	41
BAB III	METODE PENELITIAN	43
	3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
	3.2 Populasi dan Sampel	48
	3.3 Jenis dan Sumber Data	49
	3.4 Metode Pengumpulan Data	49
	3.5 Metode Analisis	49
	3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	50
	3.5.2 Uji Hipotesis	50
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian	55
	4.2 Analisis Data	57
	4.2.1 Statistik Deskriptif	57
	4.2.2 Analisis Regresi Logistik	61
	4.2.2.1 Uji Multikolonieritas	61
	4.2.2.2 Menguji Kelayakan Model Regresi	62
	4.2.2.3 Menguji Keseluruhan Model	63
	4.2.2.4 Koefisien Determinasi	63
	4.2.2.5 Menguji Koefisien Regresi	65
	4.3 Pembahasan	72

4.3.1 Hubungan Proporsi Komisaris Independen	
dengan Pengungkapan RMC	72
4.3.2 Hubungan Ukuran Dewan dengan Pengungkapan	
RMC	74
4.3.3 Hubungan Frekuensi Rapat dengan Pengungkapan	
RMC	75
4.3.4 Hubungan Reputasi Auditor dengan Pengungkapan	
RMC	76
4.3.5 Hubungan Risiko Pelaporan Keuangan dengan	
Pengungkapan RMC	77
4.3.6 Hubungan Kompleksitas dengan Pengungkapan	
RMC	78
4.3.7 Hubungan <i>Leverage</i> dengan Pengungkapan	
RMC	79
4.3.8 Hubungan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan	
dengan Pengungkapan RMC	80
BAB V	
PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Keterbatasan Penelitian	83
5.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Penentuan Jumlah Besar Sampel	55
Tabel 4.2 Distribusi Pengungkapan RMC: Keberadaan RMC	56
Tabel 4.3 Distribusi Pengungkapan RMC: Keberadaan SRMC	57
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	57
Tabel 4.5 Reputasi Auditor	59
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas Model Regresi I	61
Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas Model Regresi II	62
Tabel 4.8 Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model I	65
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model II	66
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran I.....	34
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran II	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel Penelitian	88
Lampiran B Hasil Uji Regresi Logistik	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai akibat runtuhnya beberapa perusahaan AS baik karena kecurangan maupun penipuan pelaporan akuntansi seperti yang dialami oleh Enron dan Worldcom membuat beberapa perusahaan berinisiatif untuk meningkatkan *good corporate governance* dengan memberikan perhatian terhadap peran dari manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Risiko merupakan bagian yang melekat pada strategi bisnis dan operasi sehari-hari.

Risiko dari segi finansial dan operasional selalu dihadapi oleh semua perusahaan tanpa terkecuali. Di tengah situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian persaingan bisnis serta kompleksitas perusahaan yang terus meningkat, sistem manajemen risiko merupakan salah satu perangkat utama untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin timbul. Manajemen risiko juga memberi perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi karena adanya risiko (Susilo dan Kaho, 2010).

Manajemen risiko dimulai dari adanya kesadaran manajemen menyadari bahwa risiko itu pasti ada di dalam suatu perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang akan mempengaruhinya (Susilo dan Kaho,

2010). Tidak mungkin dalam menjalankan kinerjanya suatu perusahaan tidak menemui risiko, karena risiko erat kaitannya dengan keberhasilan juga kegagalan. Disinilah perlu kesadaran dari pihak manajemen suatu perusahaan untuk dapat mengenali, memantau dan mengendalikan risiko tersebut.

Sistem manajemen risiko yang efektif sendiri merupakan suatu kekuatan perusahaan yang membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif (Andarini, 2010).

Dalam konteks manajemen risiko, dewan komisaris merupakan penanggung jawab pengawasan tertinggi di dalam perusahaan, oleh karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan juga menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Berbeda dengan dewan komisaris yang melaksanakan fungsi pengawasan, dewan direksi merupakan penanggung jawab utama pelaksanaan manajemen risiko di dalam perusahaan.

Sistem manajemen risiko perusahaan harus berfungsi sedemikian rupa agar risiko yang paling material mendapatkan perhatian dari direksi, serta memfasilitasi direksi untuk dapat memahami dan mengevaluasi keterkaitan risiko tersebut, pengaruhnya bagi perusahaan, serta bagaimana manajemen sebaiknya menanggapi risiko tersebut.

Pada tahun 2009, *Securities & Exchange Commission* (SEC) Amerika mengajukan usulan agar perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang lebih lengkap terkait dengan praktik pengawasan manajemen risiko, termasuk sejauh mana peranan direksi dan dewan komisaris di dalam mengelola risiko. Ketika perbincangan mengenai manajemen risiko semakin marak dalam dunia bisnis di Amerika Serikat, COSO menjawabnya dengan mengembangkan panduan “*Internal Control – Integrated Framework*” menjadi “*Enterprise Risk Management – Integrated Framework*” (ERM) pada tahun 2004 (Susilo dan Kaho, 2009).

Mengingat cukup beratnya tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, maka Dewan Komisaris dapat membentuk beberapa komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris agar berjalan secara lebih efektif. Komite tersebut diantaranya yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerisasi, dan Komite Manajemen Risiko. Pentingnya Komite Audit dalam suatu perusahaan terbuka dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit. Ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan publik atau emiten untuk memiliki Komite Audit. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) juga mengemukakan bahwa Komite Audit mempunyai tujuan membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Menurut *Australian Stock Exchange* (dalam Subramaniam *et al.*, (2009), “sebuah komite pengawas manajemen adalah mekanisme yang efektif untuk memfokuskan perusahaan pada fungsi pengawasan risiko, manajemen risiko, dan

pengendalian internal yang tepat.” Komite pengawas manajemen yang dimaksud itu mungkin adalah komite audit, komite manajemen resiko, atau komite lain yang berhubungan, meskipun tanggung jawab paling utama dari pengawasan manajemen risiko tetap di tangan dewan komisaris secara penuh.

Saat ini beberapa perusahaan masih mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite auditnya untuk mencapai manajemen resiko yang sesuai (Krus dan Orowitz, 2009). Terkait dengan manajemen risiko, komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Sesuai dengan peraturan Bapepam, tugas dan tanggung jawab komite audit yang terkait dengan manajemen risiko adalah melaporkan risiko-risiko yang terkait dengan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan melaporkan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Dalam menjalankan perannya yang terkait dengan manajemen risiko, komite audit mungkin akan menghadapi beberapa kendala yang mungkin muncul, diantaranya *overlapping* fungsi dengan komite manajemen risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Seiring dengan luasnya tanggung jawab dan tugas komite audit yang semakin berat menimbulkan keraguan apakah komite audit akan berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mengambil inisiatif untuk membuat suatu komite lain yang terpisah dari komite audit untuk menjalankan peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan, atau disebut dengan *Risk Management Committee* (RMC). RMC merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di dalam perusahaan.

Pemisahan antara komite audit dan RMC ini diharapkan agar fungsi pengawasan dan manajemen risiko perusahaan bisa dilakukan dengan lebih efektif.

Risk Management Committee (RMC) itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah komite pengawas manajemen yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri, yang secara khusus bertugas menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level dewan komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (KPMG, 2001 dalam Subramaniam *et al.*, 2009).

Perkembangan *Risk Management Committee* (RMC) di Indonesia sudah mulai meningkat, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum adalah pembentukan Komite Pemantau Risiko. Pembentukan Komite Pemantau Risiko ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh Bank Umum. Komite Pemantau Risiko harus dibentuk paling lambat pada akhir 2007. Bagi bank yang belum membentuk Komite Pemantau Risiko dihadapkan dengan sanksi dari Bank Indonesia. Istilah RMC di sektor perbankan ini disebut sebagai Komite Pemantau Risiko.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pembentukan RMC di dalam suatu perusahaan masih sangat jarang. Hal ini dikarenakan RMC merupakan isu yang masih tergolong baru terlebih lagi pembentukan RMC di perusahaan non finansial di Indonesia masih bersifat sukarela berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dimana pembentukan RMC sudah merupakan suatu kewajiban.

Subamaniam *et al.* (2009) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan teratas yang terdaftar dalam *Australia Stock Exchange* (ASX) dan menemukan bahwa bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC dan kompleksitas berhubungan negatif dengan keberadaan SRMC.

Yatim (2009) menemukan bahwa semakin independen, ahli, dan rajin dewan komisaris akan cenderung untuk membentuk RMC yang berdiri sendiri. Selain itu hubungan antara ukuran perusahaan, kompleksitas operasi organisasi, dan penggunaan KAP yang tergabung dalam *Big Four* juga berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Chen, *et al.* (2009) menemukan hubungan antara *cost of debt*, ukuran dewan, ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen, dan CEO independen berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan komite audit secara sukarela. Andarini dan Januarti (2010) menemukan hubungan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Penelitian ini dibuat dengan mengacu penelitian serupa yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009). Penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC dan tipe RMC yang dibentuk perusahaan, apakah RMC tergabung dengan komite audit atau RMC terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri. Variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya dengan beberapa eliminasi dan perubahan.

Penelitian ini menggunakan karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen. Karakteristik dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, kompleksitas. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Pada penelitian ini mengeliminasi dua variabel yang digunakan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009) yaitu variabel tipe industri dan *CEO Duality*. Variabel tipe industri dieliminasi karena pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan non finansial dikarenakan perusahaan finansial di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur pembentukan RMC. Variabel *CEO Duality* juga dieliminasi karena Indonesia menganut *two tier system*, yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris). Penelitian mengenai pembentukan RMC di Indonesia masih sangat jarang dilakukan oleh karena itu penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Sampai saat ini penelitian yang membahas tentang pembentukan RMC secara khusus masih sangat jarang. Hal ini dikarenakan bukti empiris tentang formasi dan struktur dari RMC masih terbatas (Subramaniam, *et al.*, 2009). Selain itu, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil pada

penelitianpenelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE* (Studi Empiris pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, bahwa aspek pengawasan merupakan salah satu kunci berjalannya sistem manajemen risiko di perusahaan yang efektif. Saat ini beberapa perusahaan masih mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite auditnya, namun hal ini menimbulkan keraguan apakah komite audit dapat berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu komite lain yaitu RMC untuk menjalankan peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan secara khusus. Masih sedikitnya penelitian mengenai karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan RMC dalam *Annual Report* mendorong dilakukannya penelitian ini. Dalam hal ini, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan RMC?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan RMC?

3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan RMC?
4. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan RMC?
5. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan RMC?
6. Apakah kompleksitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan RMC?
7. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan RMC?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan RMC.
2. Memberikan bukti secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan RMC.
3. Memberikan bukti secara empiris pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan RMC.
4. Memberikan bukti secara empiris pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan RMC.
5. Memberikan bukti secara empiris pengaruh risiko pelaporan keuangan terhadap pengungkapan RMC.

6. Memberikan bukti secara empiris pengaruh kompleksitas terhadap pengungkapan RMC.
7. Memberikan bukti secara empiris pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan RMC.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan
Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap keberadaan RMC dan tipe RMC di perusahaan nonfinansial.
2. Bagi perusahaan
Dapat mengetahui arti pentingnya penerapan manajemen risiko oleh perusahaan dan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*.
3. Bagi calon investor
Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat melakukan investasi dengan melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Bagi penelitian yang akan datang
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau wacana yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , serta sistematika penulisan.

2. Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

3. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan deksripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

5. Bab V : Penutup

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori Agensi merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang telah dipakai selama ini. Teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk sebuah kontrak kerjasama.

Teori Agensi mengasumsikan bahwa setiap individu, baik prinsipal maupun agen bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Dalam asumsi teori keagenan yang melekat adalah terdapatnya pertentangan antara pemilik usaha (pemegang saham) dengan manajer (Kiswara, 1999). Pertentangan ini timbul karena adanya keinginan dari para manajer untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya sendiri. Dan di pihak lain, para pemegang saham menginginkan untuk memaksimalkan keuntungannya, pertentangan kemudian timbul apabila keputusan yang dibuat oleh para manajer guna memaksimalkan kepuasannya sendiri tersebut ternyata tidak mensejahterakan pemegang saham (Kiswara, 1999).

Ada beberapa kemungkinan konflik dalam hubungan antara prinsipal dengan agen (*agency conflict*), konflik yang timbul sebagai akibat dari keinginan manajemen

(agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (prinsipal) untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan. *Agency Conflict* timbul pada berbagai hal berikut:

1. *Moral-Hazard*
Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.
2. *Earning Retention*
Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif.
3. *Risk Aversion*
Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah resiko bagi perusahaannya walaupun mungkin hal itu bukan pilihan yang terbaik bagi perusahaan.
4. *Time Horizon*
Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berphak pada proyok jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi dan kurang atau tidak berpihak pada proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV yang jauh lebih besar. (Alijoyo dan Zaini, 2004)

Masalah lain yang mungkin timbul dari hubungan keagenan ini yaitu agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu kondisi ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi (Indrayati, 2010).

Agen diasumsikan untuk berperilaku berdasarkan kepentingan mereka sendiri (Jensen and Meckling, 1976; Subramaniam *et al.*, 2009) dan prinsipal mempunyai

dua kesempatan utama untuk mengurangi biaya yang timbul dari masalah keagenan tersebut:

1. Mengawasi perilaku agen dengan mengadopsi auditing dan mekanisme *governance* yang lain yang menyelaraskan kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal.
2. Menyediakan insentif pekerjaan yang menarik kepada agen dan mengatur ulang struktur *reward* yang dapat mendorong agen untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal yang terbaik.

Penggunaan teori agensi telah banyak digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya khususnya tentang keberadaan komite (Ruigrok, *et al.*, 2006 dan Benz dan Frey (2007) dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Keberadaan komite yang dimaksud adalah komite audit, komite nominansi, komite remunerasi, serta komite manajemen risiko.

Secara umum, komite-komite tersebut merupakan mekanisme pengawasan internal di dalam perusahaan dan keberadaan komite pengawas yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut menyediakan kualitas pengawasan yang lebih baik dan menuntun untuk menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut diperkirakan ada dalam situasi dimana biaya agensi tinggi, seperti *leverage* tinggi serta kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Menurut Alchain and Demsetz; Fama and Jensen (dalam Firth and Rui, 2006) teori agensi juga mengemukakan bahwa sebuah moral *hazard* yang

melekat dalam hubungan prinsipal dan agen dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Sebuah komite audit merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah biaya keagenan ini. Sebuah komite audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan hal ini dapat membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham.

2.1.2 *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Teori sinyal muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Oleh karena itu, untuk mengurangi asimetris informasi yang akan terjadi perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan.

Ketika diterapkan untuk praktik *disclosure* perusahaan, Teori Sinyal mengusulkan bahwa teori tersebut umumnya bermanfaat bagi organisasi untuk mengungkapkan inisiatif dan praktik *corporate governance* yang baik sehingga menciptakan citra yang baik di pasar (Subramaniam, *et al.*, 2009). Selain itu, teori sinyal juga dapat menunjukkan konsistensi yang besar terhadap adanya pengungkapan yang luas, yaitu bahwasanya perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi dengan baik berarti perusahaan tersebut mengasingkan diri dari memiliki

kesan yang baik, yaitu bersifat informatif terhadap pasar mengenai keberadaannya (Kiswara, 1999).

Subramaniam, *et al.* (2009) juga menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada suatu kewajiban untuk perusahaan membentuk RMC. Bagaimanapun, menurut teori sinyal, sebuah perusahaan mungkin membentuk RMC sebagai komitmennya terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik dan dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.

2.1.3 Risiko

Sebagaimana diketahui, risiko selalu ada di setiap aspek kehidupan manusia sehari-hari. Risiko akan selalu ada apabila apa yang akan terjadi di masa mendatang belum diketahui dengan pasti dan risiko ini akan selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut Sonnidwiharsono (1996) dilihat dari sudut kegiatan usaha, pengaruh kegiatan usaha modern khususnya dalam sektor industri bertambah kompleks. Bertambah kompleksnya kegiatan usaha ini telah membawa pengaruh pula pada kebutuhan untuk lebih khusus memperhatikan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan.

Risiko juga dapat mengakibatkan kehancuran organisasi, karena itu risiko penting untuk dikelola. Risiko juga diyakini tidak dapat dihindari, oleh karena itu pemahaman terhadap risiko merupakan suatu langkah untuk menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4 Manajemen Risiko

Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa dapat bertahan. Kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan (Walker, *et al.* dalam Yatim, 2009). Oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan *Enterprise Risk Management* (ERM) untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin muncul. Pada tahun 2004, COSO telah menerbitkan *Enterprise Risk Management-Integrated Framework* yang menggambarkan yang menggambarkan komponen-komponen penting, prinsip dan konsep dari manajemen risiko perusahaan untuk seluruh organisasi, tanpa memandang ukurannya.

“A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” (COSO, dalam Yatim, 2009)

Sukanto (n.d) menyebutkan bahwa inti dari manajemen resiko perusahaan yaitu bahwa setiap entitas memiliki nilai untuk *stakeholder*. Semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola, mengidentifikasi, seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai *stakeholder*. Manajemen risiko perusahaan membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait

dengan risiko dan peluang dengan tujuan untuk mempertinggi nilai. Oleh karena itu, struktur manajemen risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis secara lebih efektif dan mengungkapkan hasil manajemen risiko kepada *stakeholders* organisasi (Subramaniam *et al.*, 2009).

2.1.5 Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia

Corporate Governance telah menjadi pokok bahasan yang penting bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tuntutan persaingan global menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya reformasi GCG (Alijoyo dan Zaini, 2004). Saat ini terdapat tuntutan yang besar dan ada kecenderungan bahwa Manajemen Perusahaan Perusahaan Publik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada publik (Syakhroza, 2004).

Keberhasilan penegakan GCG sangat ditentukan oleh kualitas pimpinannya yaitu komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pelaksana. Dalam mekanisme *corporate governance*, dewan komisaris memiliki peranan dan tugas yang sangat penting. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dewan komisaris dapat memberikan kontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang relevan bagi para *stakeholders*.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tugas utama dewan komisaris adalah:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan bilamana perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi di dalam perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. *One tier system* atau sistem satu tingkat banyak dianut oleh negara yang cenderung mengikuti hukum *anglo-saxon (common law)*, sedangkan *two*

tier system atau sistem dua tingkat banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa dan negara-negara lain yang menganut *civil law*, termasuk Indonesia.

Dalam *one-tier system*, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu kesatuan dan disebut *Board of Director*. Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam *two-tier system*, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh dewan direksi.

Dalam *two tier system* sangat jelas ada perbedaan antara fungsi pengambilan dan pelaksanaa kebijakan dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya dijalankan oleh dewan direksi. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh dewan direksi dilakukan oleh dewan komisaris. Berbeda dengan *one tier system* yang tidak jelas siapa yang menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya yang begitu luas, Dewan Komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris agar berjalan secara lebih efektif. Menurut Harrison (dikutip oleh Subramaniam, et al., 2009) ada dua tipe komite-komite dewan. Tipe yang pertama merupakan komite yang menjalankan peranan penting dalam memberikan masukan kepada manajemen dan dewan komisaris pada pengambilan keputusan bisnis yang penting bagi perusahaan, contohnya yaitu komite perencanaan strategis. Tipe yang kedua berhubungan dengan fungsi *monitoring* atau pengawasan dari dewan, seperti komite audit, komite

remunerasi, dan komite nominasi. Komite-komite tersebut secara spesifik dapat meningkatkan akuntabilitas dari dewan sebagaimana mereka menyediakan pengawasan independen dari berbagai aktivitas dewan.

Komite Audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai salah satu organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit timbul sebagai akibat peran pengawasan dan dewan komisaris perusahaan pada umumnya belum memadai. Pentingnya Komite Audit dalam suatu perusahaan terbuka dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit. Ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan publik atau emiten untuk memiliki Komite Audit (Indra dan Yustiavandana, 2008).

2.1.6 Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Saat ini, keberadaan RMC dirasa sebagai sebuah pengawasan penting komite dewan (Fields and Keys dalam Subramaniam, et al., 2009). Secara umum, luas area tanggung jawab dari RMC adalah:

1. Menentukan strategi manajemen resiko organisasi;
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi;
3. Menilai pelaporan keuangan organisasi;
4. Memastikan bahwa organisasi patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

RMC bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan (Alijoyo dan Zaini,

2004). Krus and Orowitz (2009) mengatakan pentingnya dibentuk sebuah komite yang terpisah dari komite audit dalam pengawasan risiko perusahaan. Selama ini, banyak perusahaan yang menugaskan pengawasan risiko perusahaan kepada komite auditnya. Pentingnya pengawasan risiko dan keberadaan risiko, perusahaan mungkin akan mempertimbangkan untuk membuat sebuah komite yang khusus menangani pengawasan risiko perusahaan agar berjalan secara efektif.

RMC dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan dalam tanggungjawabnya terhadap pengawasan risiko, manajemen risiko dan pengendalian internal (Subramaniam, et al., 2009). Dengan membentuk sebuah komite yang terspesialisasi, seperti RMC akan mungkin untuk mencurahkan waktu dan usaha yang lebih banyak dengan menyatukan berbagai risiko dan mengevaluasi pengendalian yang berhubungan secara keseluruhan (Subramaniam, *et al.*, 2009). RMC merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. RMC bertugas untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengawasi, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan meskipun tanggung jawab atas pengelolaan risiko berada di tangan komisaris dan direksi (Effendi, 2009).

Dalam sektor perbankan, RMC disebut pula dengan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh Bank Umum yaitu tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum adalah pembentukan Komite Pemantau Risiko. Komite ini merupakan komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan, khususnya di bidang manajemen risiko.

Dibandingkan dengan sektor non-perbankan, ternyata risiko sektor perbankan lebih banyak dan jauh lebih kompleks. Tercatat kurang lebih ada 9 (sembilan) risiko yang dihadapi mulai dari risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (Fajri, 2007). Oleh karena itu, Bank Indonesia mengakomodir hal ini dengan mewajibkan pembentukan Komite Pemantau Risiko yang sekurangnya memiliki fungsi untuk melaksanakan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di tingkat Direksi. Pembentukan Komite Pemantau Risiko haruslah benar-benar efektif dengan mempertimbangkan tingkat kegunaannya bagi perusahaan.

2.1.7 Komisaris Independen

Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG. Komisaris menurut kode tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan member nasihat bilamana diperlukan (Juwitasari, 2008). Namun terkadang dewan komisaris di suatu perusahaan belum bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap direksi dengan baik (Kusuma, 2004 dalam Yuliandri, 2010). Oleh karena itu, adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat meningkatkan peran dari

dewan komisaris sehingga dapat tercipta *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan.

“Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*transparency, accountability, responsibility, fairness*). (Alijoyo dan Zaini, 2004)

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No : Kep-305/BEJ/07-2004 di dalam Pencatatan Efek No 1- A: tentang Ketetapan Umum Pencatatan Saham dan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris.

2.1.8 Ukuran Dewan Komisaris

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, jumlah dewan direksi dan dewan komisaris berbeda-beda. Jumlah dewan yang besar dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam perusahaan

(Indrayati, 2010). Jumlah anggota dewan komisaris setidaknya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan jumlah anggota dewan direksi, karena apabila jumlah anggota dewan komisaris lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dewan direksi, maka akan terdapat kemungkinan anggota dewan komisaris mendapat tekanan psikologis jika ada perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut (Indrayati, 2010).

Ukuran dewan komisaris akan berdampak pula terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004). Jika jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu sedikit mungkin akan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah dan mungkin pengawasan terhadap keputusan yang telah diambil juga akan rendah.

2.1.9 Frekuensi Rapat

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilalui oleh dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh dewan direksi dan implementasinya (Waryanto, 2010).

Keefektifan dari dewan komisaris dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti frekuensi *meeting* dewan komisaris dan perilaku-perilaku dari anggota dewan komisaris di sekitar pelaksanaan *meeting*, seperti kehadiran dalam *meeting*, persiapan sebelum *meeting*, dan partisipasi anggota dalam *meeting*) (Yatim, 2009). Keuntungan sering diadakannya *meeting* oleh dewan komisaris yaitu anggota dewan dapat

mempunyai tambahan waktu untuk membicarakan, menentukan strategi apa yang akan diambil oleh perusahaan, dan memonitor manajemen.

Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi *meeting* dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris. Selain itu, aktivitas dewan (frekuensi *meeting*) yang tinggi akan menghasilkan *monitoring* yang baik dari dewan, maka anggota secara tidak langsung akan meminta *meeting* dewan untuk diadakan lebih sering untuk menambah kemampuan mereka dalam memonitor manajemen.

2.1.10 Reputasi Auditor

Auditor merupakan kunci mekanisme pengawasan eksternal dari sebuah organisasi, dan dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian bagi manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Auditor eksternal juga dapat mempengaruhi sistem pengawasan internal klien dengan membuat rekomendasi *post-audit* pada peningkatan desain dari sistem (Subramaniam, *et al.*, 2009). Auditor dengan reputasi baik seperti *Big Four* juga cenderung untuk lebih memilih berhubungan dengan klien yang memiliki nilai yang baik dalam komunitas bisnis, oleh karena itu auditor *Big Four* akan mempengaruhi klien untuk bertindak sesuai dengan praktek terbaik. (Carson, 2002 dalam Andarini, 2010).

Auditor *Big Four* dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan internal yang lebih tinggi kepada kliennya dibandingkan dengan auditor non-*Big Four* (Cohen *et al.*, 2004 dalam Subramaniam *et al.*, 2009).

2.1.11 Risiko Pelaporan Keuangan

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Dengan proporsi piutang usaha yang lebih besar maka risiko piutang tak tertagih dan piutang diragukan yang diakui dengan tidak tepat juga akan bertambah besar.

2.1.12 Leverage

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah perusahaan, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan dan sebaliknya apabila rasio *leverage* rendah maka risiko keuangan atau risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin rendah.

Semakin besar rasio utang dengan aset atau rasio utang dengan ekuitas, berarti makin besar risiko keuangan perusahaan, karena semakin besar risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetap berupa bunga ataupun pelunasan utang pokoknya dalam situasi perekonomian yang memburuk (Halim, 2007 dalam Yuliandri, 2010).

2.1.13 Kompleksitas

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Organisasi dengan jumlah segmen bisnis yang besar biasanya memiliki bermacam-macam produksi, departemen-departemen atau strategi pemasaran (Subramaniam *et al.*, 2009). Sebagai hasilnya, kompleksitas yang lebih besar meningkatkan risiko pada tingkat level yang berbeda termasuk risiko operasional dan teknologi yang menuntun terhadap permintaan yang lebih besar untuk mengawasi risiko tersebut (Subramaniam *et al.*, 2009).

2.1.14 Ukuran Perusahaan

Ada beberapa macam variabel yang secara umum digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu total *asset*, total *sales*, dan jumlah karyawan (Nico, 2010). Dalam hal ini, ukuran perusahaan yang dipakai yaitu total *asset*. Total *asset* menggambarkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan maka semakin besar skala/ukuran perusahaan. sebaliknya jika semakin kecil sumber daya yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil pula ukuran perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan yang menguji tentang pembentukan komite secara sukarela yang dihubungkan dengan berbagai macam variabel independen. Namun umumnya, penelitian yang telah dilakukan lebih banyak membahas tentang pembentukan komite audit secara sukarela. Penelitian mengenai pembentukan RMC sendiri masih jarang untuk diteliti.

Subamaniam *et al.* (2009) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan teratas yang terdaftar dalam *Australia Stock Exchange* (ASX). Penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik dewan dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC di sebuah perusahaan. Penelitian ini juga untuk mengetahui tipe RMC, apakah RMC tergabung dengan komite audit atau terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri (SRMC). Karakteristik dewan dalam penelitian ini terdiri dari proporsi komisaris independen, *CEO Duality*, dan ukuran dewan. Sedangkan karakteristik perusahaan terdiri dari tipe auditor eksternal, tipe industri, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan *leverage*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC dan kompleksitas berhubungan negatif dengan keberadaan SRMC.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2009) menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dan insentif terhadap pembentukan komite audit secara

sukarela. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 224 perusahaan non-top 500 yang terlisting di ASX pada tahun 2005. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham yang besar, ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, status CEO, tipe auditor eksternal, dan rasio *fee* non-audit dan audit auditor eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, CEO independen dengan pembentukan komite audit secara sukarela.

Yatim (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pembentukan RMC dan struktur dewan. Penelitian ini menggunakan sampel 690 perusahaan yang listing pada Bursa Malaysia pada tahun 2003. Variabel independen yang digunakan yaitu proporsi komisaris independen, CEO independen, keahlian dewan, dan kerajinan dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan CEO independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari komite audit). Perusahaan dengan keahlian dan kerajinan dewan yang tinggi juga berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

Penelitian yang dilakukan Andarini dan Januarti (2010) menguji hubungan karakteristik dewan komisaris (proporsi komisaris independen dan ukuran dewan) dan karakteristik perusahaan (reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, dan ukuran perusahaan) terhadap pengungkapan RMC. Penelitian ini menggunakan sampel 248 perusahaan non-finansial yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa hanya ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan RMC dan SRMC.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NAMA	VARIABEL	METODE	HASIL
Subramaniam et al. (2009)	- Keberadaan RMC dan tipe RMC (Tergabung atau Terpisah dari Komite Adit) - Proporsi Komisaris Independen - CEO <i>Duality</i> - Ukuran Dewan - Tipe Auditor Eksternal - Tipe Industri - Kompleksitas - Risiko Pelaporan Keuangan <i>Leverage</i>	Regresi Logistik	- CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. - CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC dan kompleksitas berhubungan negatif dengan keberadaan SRMC.
Chen et al. (2009)	- Pembentukan Komite Audit secara sukarela <i>Leverage</i> - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Saham Yang Besar - Ukuran Perusahaan - Ukuran Dewan - Proporsi Komisaris Independen	Regresi Logistik	Terdapat hubungan positif dan signifikan antara ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, CEO independen dengan pembentukan komite audit secara sukarela.

	• Status CEO • Tipe Auditor Eksternal • Rasio <i>Fee</i> Non-Audit dan Audit Auditor Eksternal		
Yatim (2009)	• Pembentukan RMC • Proporsi Komisaris Independen • CEO Independen • Keahlian Dewan • Kerajinan Dewan	Regresi Logistik	• Bahwa proporsi komisaris independen dan CEO independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari komite audit). • Perusahaan dengan keahlian dan kerajinan dewan yang tinggi juga berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.
Andarini dan Januarti (2010)	• Keberadaan RMC dan tipe RMC (Tergabung atau Terpisah dari Komite Adit) • Proporsi Komisaris Independen • Ukuran Dewan • Tipe Auditor Eksternal • Tipe Industri • Kompleksitas • Risiko Pelaporan Keuangan • <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan	Regresi Logistik	• Hanya ukuran perusahaan yang berhubungan positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC maupun SRMC.

2.3 Kerangka Pemikiran

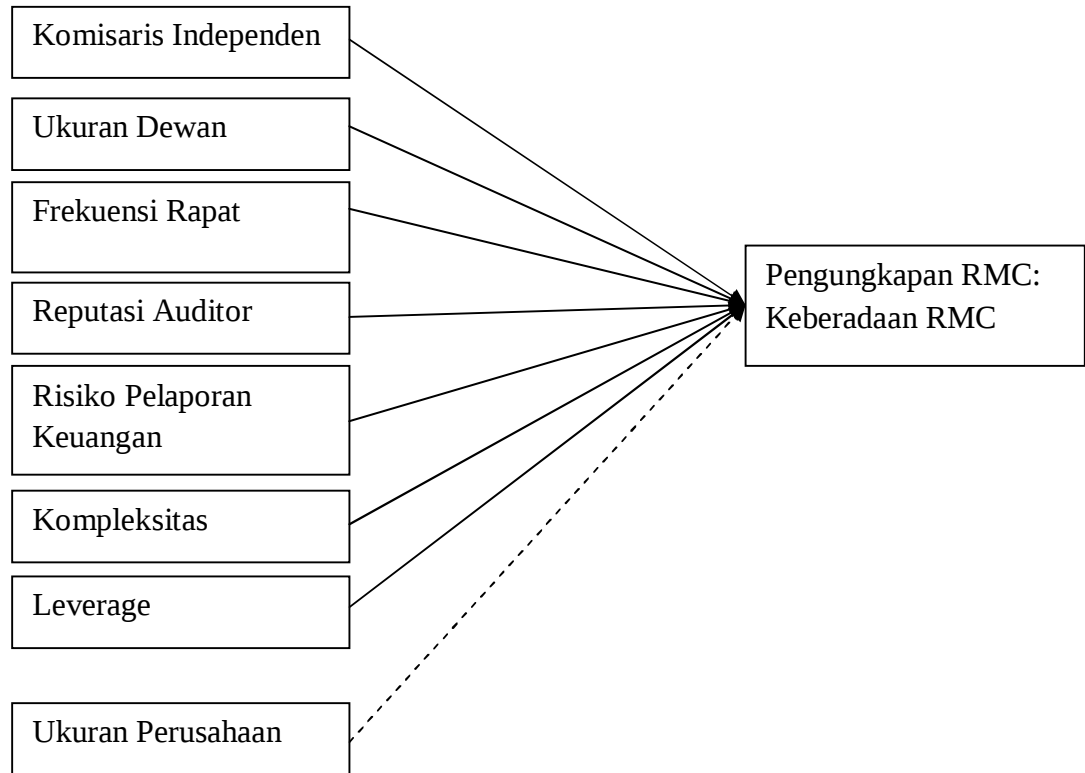
Komite Manajemen Risiko merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di dalam perusahaan. Selama ini, banyak perusahaan yang menugaskan pengawasan risiko perusahaan kepada komite auditnya. Oleh karena itu beberapa perusahaan perlu membuat komite yang terspesialisasi (RMC yang terpisah dari komite audit) agar tugas pengawasan risiko perusahaan berjalan secara efektif. RMC dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan dalam tanggungjawabnya terhadap pengawasan risiko, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC dan tipe RMC, apakah RMC tergabung dengan komite audit atau berdiri sendiri (SRMC). Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel independen karakteristik dewan komisaris yaitu komisaris independen, ukuran dewan, dan frekuensi rapat serta karakteristik perusahaan yaitu reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, kompleksitas, *leverage*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran I

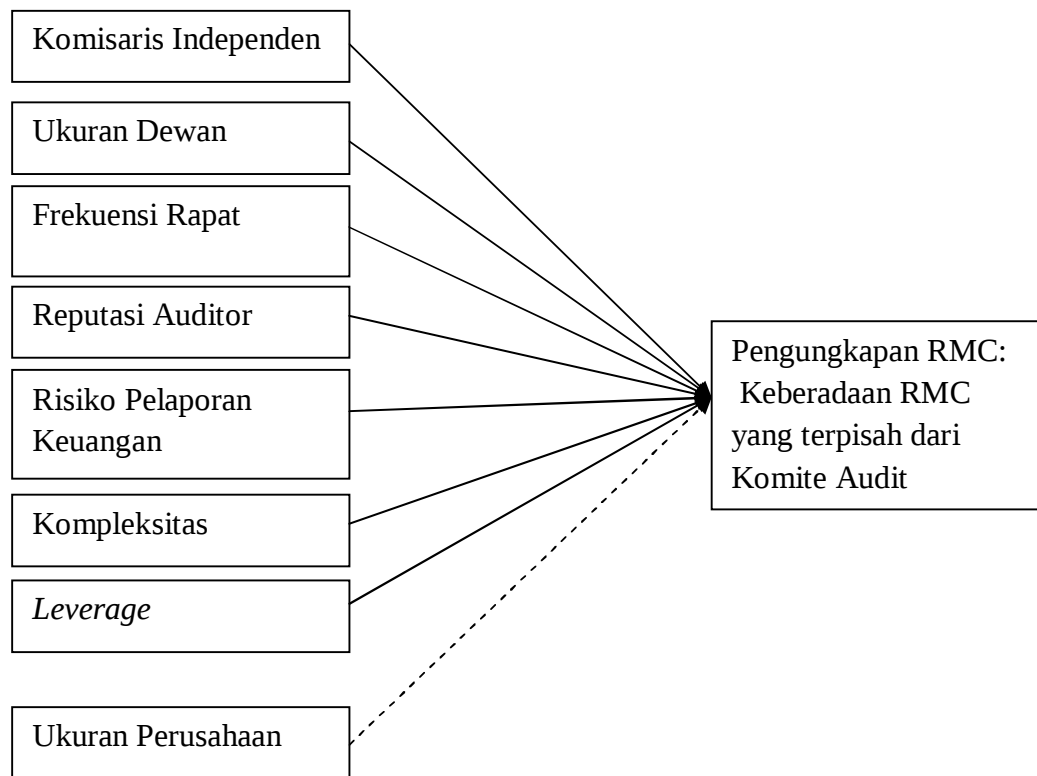


Keterangan:

_____ : Variabel Independen

----- : Variabel Kontrol

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran II



Keterangan:

_____ : Variabel Independen

----- : Variabel Kontrol

2.4 Hipotesis

2.4.1 Komisaris Independen dengan Pengungkapan RMC

Independensi merupakan hal yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Proporsi komisaris independen di dalam suatu dewan merupakan sebuah indikator independensi dari dewan. Sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009). Pincus, *et al.* (1989) dalam Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen di dalam sebuah dewan akan meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka tidak berhubungan dengan perusahaan sebagai pegawai, dan mereka juga berperan sebagai perwakilan independen dari kepentingan *shareholders*.

Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan, dan dengan membentuk RMC mungkin dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggungjawab pengawasan manajemen risiko dibandingkan dengan proporsi komisaris independen yang rendah. Selain itu, sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar akan lebih menyukai pembentukan RMC yang berdiri sendiri atau terpisah dari komite audit karena pembentukan RMC ini akan bisa lebih berfokus pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko perusahaan.

Penelitian Yatim (2009) memberikan sebuah hasil yaitu sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen yang besar cenderung untuk membentuk RMC,

bahkan RMC yang berdiri sendiri, untuk meningkatkan kemampuan *monitoring* mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H1(a) : Komisaris independen berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

H1(b) : Komisaris independen berhubungan positif dengan keberadaan SRMC.

2.4.2 Ukuran Dewan dengan Pengungkapan RMC

Keberadaan RMC mungkin juga berubungan dengan ukuran dewan. Ukuran dewan yang besar cenderung dapat menjadi sumber daya yang besar bagi dewan komisaris (Subramaniam, *et al.*, (2009). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan memberikan kekuatan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

Ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk dewan komisaris yang ditujukan untuk manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi dewan komisaris membentuk RMC, dan tingkat sumber daya yang ditawarkan oleh ukuran dewan yang besar akan membuat dewan

komisaris lebih menyukai dibentuknya RMC yang berdiri sendiri atau tidak tergabung dengan komite audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H2(a) : Ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

H2(b) : Ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC.

2.4.3 Frekuensi Rapat dengan Pengungkapan RMC

Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi *meeting* dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris. Fokus pada *meeting* dewan adalah tepat mengingat frekuensi *meeting* dewan secara potensial akan meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi *internal control* (seperti, RMC) dan menjadikan dewan lebih efektif dalam tugas pengawasannya. Frekuensi dari *meeting* dewan menjadikan sebuah dewan lebih aktif (Raghuhandan and Rama dalam Yatim (2009).

Intensitas aktivitas dewan, seperti frekuensi *meeting* ini dapat memberikan kontribusi dalam fungsi pengawasan. Pertemuan dewan yang diadakan lebih sering akan memperlihatkan bahwa anggota dewan tersebut terlihat lebih rajin dan hal itu akan menguntungkan bagi *shareholders*. *Meeting* dewan juga merupakan suatu sumber daya dalam meningkatkan keefektifan dari dewan. Oleh karena itu, semakin

sering anggota dewan menyelenggarakan rapat maka akan dapat mendukung terbentuknya suatu komite baru yaitu RMC.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H3(a) : Frekuensi rapat berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

H3(b) : Frekuensi rapat berhubungan positif dengan keberadaan SRMC.

2.4.4 Reputasi Auditor dengan Pengungkapan RMC

Auditor merupakan mekanisme pengawasan eksternal dari sebuah organisasi, dan baru-baru ini menjadi pusat perhatian bagi manajemen risiko. Ukuran perusahaan audit dapat berpengaruh terhadap pembentukan komite baru (Chen, *et al.*, 2009). Perusahaan audit yang tergabung dalam *Big Four* dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan internal kliennya dibandingkan dengan auditor non *Big Four* (Cohen (2004) dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Tuntutan seperti itu mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga kualitas audit dan untuk melindungi reputasi mereka. Oleh karena itu, tekanan yang lebih besar akan terdapat pada perusahaan yang menggunakan jasa audit non *Big Four* untuk membentuk RMC dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa audit non *Big Four*. Selain itu, pembentukan RMC yang terpisah dari komite audit akan dipilih oleh auditor Big Four dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dari pengawasan dan penilaian risiko perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan

Yatim (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor Big Four cenderung untuk membentuk RMC.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H4(a) : Reputasi Auditor berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

H4(b) : Reputasi Auditor berhubungan positif dengan keberadaan SRMC.

2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan dengan Pengungkapan RMC

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Pembentukan RMC dan terutama SRMC, akan memfasilitasi pengawasan yang lebih baik dari risiko-risiko tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H5(a) : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

H5(b) : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC.

2.4.6 Kompleksitas dengan Pengungkapan RMC

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Kompleksitas yang lebih besar meningkatkan risiko pada tingkat level yang berbeda termasuk risiko operasional dan teknologi yang menuntun terhadap permintaan yang lebih besar untuk mengawasi risiko tersebut (Subramaniam *et al.*, 2009). Semakin besar segmen bisnis yang dimiliki perusahaan maka akan membutuhkan mekanisme manajemen risiko yang efektif. Hal ini akan menyebabkan pembentukan RMC menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan.

Penelitian Yatim (2009) membuktikan bahwa kompleksitas dari operasi perusahaan membutuhkan pengawasan yang lebih besar dari RMC yang secara utama berfokus untuk mengidentifikasi risiko bisnis dan menemukan cara untuk mengurangi risiko tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H6(a) : Kompleksitas berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

H6(b):Kompleksitas berhubungan positif dengan keberadaan SRMC.

2.4.7 Leverage dengan Pengungkapan RMC

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan membuat keadaan keuangan perusahaan menjadi memburuk, hal ini disebabkan semakin

besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya risiko tersebut tentu pembentukan RMC akan menjadi mekanisme yang penting dalam mengawasi risiko tersebut, dan lebih jauh, RMC yang berdiri sendiri akan menjadikan fungsi pengawasan risiko lebih efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H7(a) : *Leverage* berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

H7(b) : *Leverage* berhubungan positif dengan keberadaan SRMC

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

1. Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan RMC yang terdiri dari keberadaan RMC dan keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri.

2. Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen yaitu variabel komisaris independen, ukuran dewan, tingkat kerajinan dewan, reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, kompleksitas, dan *leverage*.

3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu variabel ukuran perusahaan.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

a. Keberadaan RMC

Dalam penelitian ini keberadaan RMC diklasifikasikan menjadi:

1. Nol, ketika sebuah perusahaan tidak membentuk ataupun mengungkapkan keberadaan dari RMC.
2. RMC yang tergabung, ketika dalam laporan tahunan perusahaan mengungkapkan keberadaan suatu komite di bawah komite audit.
3. RMC yang terpisah, ketika dalam laporan tahunan keberadaan sebuah komite yang terpisah dari komite audit yang secara khusus mengawasi risiko perusahaan yang disebut sebagai “RMC”.

Dalam penelitian ini, keberadaan RMC diukur dengan menggunakan *variabel dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC (baik sebagai komite yang terpisah atau komite yang tergabung dengan komite audit) diberi nilai satu (1), sedangkan diberi nilai nol (0) apabila perusahaan tidak mengungkapkan keberadaan RMC dalam laporannya (Subramaniam, et al., 2009).

b. Keberadaan RMC yang Terpisah Dari Komite Audit dan Berdiri Sendiri (SRMC)

Dalam penelitian ini, keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri diukur dengan menggunakan *variabel dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC sebagai komite yang terpisah dari komite audit diberi nilai satu (1), sedangkan diberi nilai nol (0) apabila perusahaan mengungkapkan keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit dalam laporan tahunannya (Subramaniam, et al., 2009).

2. Variabel Independen

Karakteristik Dewan Komisaris:

a. Komisaris Independen (NONEXECDIR)

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*”serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya (Alijoyo dan Zaini, 2004). Dalam penelitian ini independensi dewan komisaris dinyatakan dalam presentase jumlah anggota komisaris independen pada

dewan dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Subramaniam, et al., 2009).

$$\text{NONEXECDIR} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

b. Ukuran Dewan (BOARDSIZE)

Ukuran dewan komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004). Ukuran dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan komisaris (Subramaniam, et al., 2009).

c. Frekuensi Rapat (BOARDMEET)

Keefektifan dari dewan dapat dipengaruhi oleh frekuensi *meeting*, frekuensi rapat yang tinggi dapat menghasilkan monitoring yang lebih baik. Dalam penelitian ini, frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan jumlah *meeting* yang diselenggarakan selama satu tahun (Yatim, 2009).

Karakteristik Perusahaan:

d. Reputasi Auditor (BIGFOUR)

Reputasi auditor ditunjukkan dengan apakah suatu perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternalnya yang tergabung dalam KAP *Big Four* yang

merupakan suatu kelompok KAP internasional. Dalam penelitian ini, reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tergabung dalam *Big Four* diber nilai satu (1), dan sebaliknya diberikan nilai nol (0) (Subramaniam, et al., 2009).

e. Risiko Pelaporan Keuangan (FINREP)

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini risiko pelaporan keuangan diukur dengan menjumlah piutang dan persediaan dibagi dengan total asset (Subramaniam, et al., 2009).

$$\text{FINREP} = \frac{\text{Piutang Usaha} + \text{Persediaan}}{\text{Total Asset}}$$

f. Kompleksitas (BUSSEGMENT)

Kompleksitas yang lebih besar akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Kompleksitas dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah segmen bisnis/usaha yang dimiliki oleh perusahaan (Subramaniam, et al., 2009).

g. *Leverage* (LEV)

Leverage suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi pada suatu waktu. Dalam penelitian ini

leverage diukur dengan membagi total hutang dengan total aset (Subramaniam, et al., 2009).

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

3. Variabel Kontrol

a. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menjumlah total asset yang dimiliki perusahaan (Subramaniam, et al., 2009).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2008-2009. Hal ini untuk mengetahui perkembangan pengungkapan RMC pada perusahaan non finansial selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2008 hingga 2009.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan pada periode 2008-2009.
- c. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari tahun 2008 hingga 2009, salah satunya tentang pengungkapan frekuensi rapat dewan komisaris.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2009. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI <http://www.idx.co.id> dan pojok BEI Fakultas Ekonomi Undip.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka dan studi observasi. Metode studi pustaka yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara

membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam lingkup penelitian ini.

Sedangkan metode studi observasi, yaitu dengan cara memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI di situsnya dan pojok BEI Fakultas Ekonomi Undip. Data yang digunakan merupakan data *time series*.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean, nilai minimal dan maksimal serta standar deviasi semua variabel tersebut.

3.5.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Logistic Regression* (Regresi Logistik). Regresi Logistik tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedasitas, dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya (Ghozali, 2006). Regresi Logistik sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini karena variabel dependen dalam penelitian ini *dichotomous* (Subramaniam et al., 2009).

Variabel dependen yang digunakan yaitu keberadaan RMC di dalam perusahaan dan keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit atau berdiri

sendiri. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) sehingga Regresi Logistik dapat dipakai (Ghozali, 2006).

Persamaan Regresi Logistik dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{logit(RMC)} = & \alpha + \beta_1 (\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 \\ & (\text{BOARDMEET}) + \beta_4 (\text{BIGFOUR}) + \beta_5 (\text{FINREP}) + \\ & \beta_6 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_7 (\text{LEV}) + \beta_8 (\text{SIZE}) + e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{logit(SRMC)} = & \alpha + \beta_1 (\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 \\ & (\text{BOARDMEET}) + \beta_4 (\text{BIGFOUR}) + \beta_5 (\text{FINREP}) + \\ & \beta_6 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_7 (\text{LEV}) + \beta_8 (\text{SIZE}) + e \end{aligned}$$

Keterangan:

RMC = Variabel *dummy* keberadaan RMC, dimana perusahaan yang memiliki RMC bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.

SRMC = Variabel *dummy* keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit, dimana perusahaan yang memiliki RMC terpisah dari komite

		audit bernilai 1
		dan 0 untuk sebaliknya.
α	=	Konstanta
NONEXECDIR	=	Proporsi komisaris independen
BOARDSIZE	=	Ukuran dewan
BOARDMEET	=	Frekuensi rapat
BIGFOUR	=	Variabel <i>dummy</i> dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal <i>Big Four</i> diberi nilai 1, dan 0 untuk sebaliknya.
FINREP	=	Risiko pelaporan keuangan
BUSSEGMENT	=	Kompleksitas
LEV	=	<i>Leverage</i>
SIZE	=	Ukuran perusahaan

Analisis pengujian model regresi logistik:

1. Menilai Model Regresi

Regresi logistik adalah model regresi yang sudah mengalami modifikasi, sehingga karakteristiknya sudah tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu, penentuan signifikansi secara statistik berbeda dalam dari regresi berganda. Kesesuaian model (*goodness of fit*) dapat dilihat dari R^2 ataupun F test.

Penilaian model regresi logistik dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai probabilitas (sig.) pada uji *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2006).

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

2. Menilai *Overall Model Fit*

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) ditujukan dengan *Log likelihood value* (nilai -LL) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai -2LL pada awal (block number = 0), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2LL, pada saat *Block Number* = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai -2LL *Block Number* = 0 > nilai -2LL *Block Number* = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. *Log likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian "*Sum of Square Error*" pada model regresi, sehingga penurunan *log likelihood* menunjukkan model yang semakin baik.

3. Menguji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol antara satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam Regresi Logistik menguji R^2 menggunakan uji Cox & Snell dan Nagelkerke (Ghozali, 2006).

4. Menguji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan *Wald statistic* dan nilai profitabilitas (sig.) dengan cara nilai *Wald statistic* dibandingkan dengan *Chi-square* tabel, sedangkan nilai probabilitas (sig.) dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α). Untuk menentukan penerimaan atau penolakan H_0 didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria :

- a. H_0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) $> \alpha$ (5%), hal ini berarti H_a . alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
- b. H_0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) $< \alpha$ (5%), hal ini berarti H_a . alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.